# PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta
2. Mendorong Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakatterhadap Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	1. **Struktur Organisasi**

Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan**



Dari bagan struktur organisasi Kecamatan Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
3. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
4. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
	1. **Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Kecamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan masyarakat, penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota, pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

1. Camat mempunyai fungsi

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

4. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

7. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota

8. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

9. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

b)Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai rincian tugas:

1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan tekhnis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah kecamatan;
7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;

8.melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

b. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;
4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor;
5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan;
12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;
13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.2.Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
	1. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
	2. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan
	3. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi
	4. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;
	5. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
	6. melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
	7. melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
	8. melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.
		* 1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
			2. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
			3. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
			4. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan Kecamatan;
			5. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan;
			6. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
			7. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
			8. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
			9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, keagrarian, pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

* + 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
		2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
		3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;
		4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
		5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
		6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;
		7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK;
		8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;
		9. melaksanakan peniliaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;
		10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;
		11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
		12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;
		13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
		14. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
	1. penanggulangan bencana;
	2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
	3. penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
	4. melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
1. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
4. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
5. melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah;
6. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang pasti;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
8. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
9. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, informasi dan pengaduan.

 Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas :

* 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
	2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
	3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan;
	4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
	5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
	6. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan sesuai kewenangan Kecamatan;
	7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi :
		1. administrasi pertanahan;
		2. administrasi kependudukan; dan
		3. administrasi pelayanan umum.
	8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
	9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;
	10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian
	11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;
	12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan;
	13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;
	14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat;
	15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
	16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan.
2. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;
3. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
4. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
5. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan
6. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan;
7. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;
9. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;
10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;
11. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
12. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
13. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.
14. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah;
15. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;
16. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi
	1. peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal
	2. perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;
	3. pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan
	4. perbaikan kamar mandi/toilet umum
	5. pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
	6. pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan;
	7. perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis pemberdayaan masyarakat;
	8. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;
18. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan;
19. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;
20. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
21. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan;
22. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
23. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;
24. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;
25. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
26. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e)Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;
8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;
10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
	1. **Isu-Isu Strategis**

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

## 1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Profesional;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Kraton pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satusatunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pembangunan gedung Kantor Kelurahan Panembahan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

## 2.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

## 3.Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

##  4.Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

## 5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

* 1. **Keadaan Pegawai**

Sumber Daya Manusia baik dari segi kwantitas maupun kwalitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, menambah beban tugas. Di Kecamatan Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 40 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sebagaimana Keputusan Walikota Nomor: 596/Kep/2006 untuk Kecamatan dan Kelurahan berjumlah 32 orang masih sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kecamatan maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Kraton didukung oleh sebanyak 32 Pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kraton yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 32 orang pegawai, terdiri dari 22 orang pegawai tetap (PNS), 5 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 5 orang Tenaga teknis. Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Kraton terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah : 9 orang

SMA : 3 orang

D2/3 : 1 orang

S1 : 3 orang

S2 : 2 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah : 13 orang

SMA : 1 orang

D2/3 : 2 orang

S1 : 9 orang

S2 : 1 orang

Tabel 1.4

## Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | N A M A  | JABATAN  | GOL  | PENDIDIKAN  |
| 1  | Drs. S. Widodo Mujiyatna  | Camat  | IV / b  | Sarjana  |
| 2  | Anif Luhur Kurniawan, SIP  | Sekcam  | III / d | Sarjana  |
| 3  | Joko Sulistyo  | Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Tibum  | III / d  | SLTA  |
| 4  | Agus Budi Hartono, S.Kom, M.Eng | Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan  | III / d  | Pasca Sarjana  |
| 5  | Junidartig Junus, SIP, MM | Kasi Perekonomian dan Pembangunan  | IV / a | Pasca Sarjana |
| 6  | Ari Widawati, ST, M.Eng | Kasi Pemberdayaan Masyarakat  | III / d  | Pasca Sarjana  |
| 7  | Sulistiyowati, SE  | Kasubag Keuangan, PEP  | III / c  | Sarjana  |
| 8  | Sesarius Chandra Yudhihantoro, SE  | Kasubag Umum & Kepegawaian  | III / c  | Sarjana  |
| 9.  | Eka Rulina Septi K., SE  | Bendahara Subag Keuangan PEP  | III/a  | Sarjana  |
| 10. | Ismiyatun  | Verifikator Subag Keuangan PEP  | II / b | SMK  |
| 11. | Wisnu Karyanta, S.IP  | Pengelola Adm Pem Seksi Pem Trantibum  | III/c  | Sarjana  |
|  12. | RYV AgusWibisana,AMd  | Pengelola PM Seksi PM  | III/c  | D3  |
| 13. | Agustina Tri Hutami  | Pengadministrasi Kepegawaian  | Naban  | SLTA  |
| 14. | Nur Agustono  | Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Pereko  | Naban  | SLTA  |
|  | **KEL. PATEHAN**  |  |  |  |
| 1  | Handani Bagus Setyarso, S.Sos | Lurah Patehan  | III / d | Sarjana |
| 2  | kosong  | Sekretaris Lurah  | -  | -  |
| 3  | Kunto Kinarning P, SH  | Kasi PPT  | III / c  | Sarjana  |
| 4  | Sri Kadarwati, A,Md | Kasi PIP  | III/c  | Sarjana Muda |
| 5  | Eny Purwati  | Kasi Perekonomian & Pemberdayaan  | III / c  | SLTA  |
| 6  | M. Faisol Fuadi Hs  | Petugas Kebersihan  | Naban  | SLTA  |
|  | **KEL. PANEMBAHAN**  |  |  |  |
| 1  | Kosong  | Lurah Panembahan  | -  | - |
| 2  | Kosong  | Sekretaris Lurah  | -  | - |
| 3  | Joko Aryanto, A.Md  | Kasi PPT  | III/b  | D3  |
| 4  | Triyatna, S.IP  | Kasi PIP  | III/b  | Sarjana  |
| 5  | Efi Widiastuti, S.Pd  | Kasi Perekonomian & Pemberdayaan  | III/d  | Sarjana  |
| 6  | M. Joko Saputro  | Petugas Kebersihan  | Naban  | SMK  |
|  | **KEL. KADIPATEN**  |  |  |  |
| 1  | Kosong  | Lurah Kadipaten  | -  | - |
| 2  | Gunawan Sigit Putranto, S.H  | Sekretaris Lurah  | III / b  | Sarjana |
| 3  | Poniman, SH  | Kasi PPT  | III/d  | Sarjana  |
| 4  | Andriani Mulati Sari  | Kasi PIP  | III/c  | SLTA  |
| 5  | Kosong | Kasi Perekonomian & Pemberdayaan  | - | - |
| 6  | Wahyu Deni Yananto  | Petugas Kebersihan  | Naban  | D3  |

### Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kec. Kraton Tahun 2020

* 1. **Keadaan Sarana Dan Prasarana**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Kraton.

**Tabel 1.5.1**

**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kraton**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SPESIFIKASI BARANG** | **JUMLAH** |
| **No** | **Nama/Jenis/Barang** | **Jumlah Barang** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Mesin Pompa Air | 1 |
| 2 | Minibus | 1 |
| 3 | Sepeda Motor | 11 |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda 3 | 1 |
| 5 | Sepeda | 2 |
| 6 | Sepeda Listrik | 1 |
| 7 | Mesin Gergaji | 1 |
| 8 | Mesin Ketik standar | 3 |
| 9 | Mesin Ketik | 4 |
| 10 | Mesin Hitung Elektronik | 10 |
| 11 | Mesin Absen | 1 |
| 12 | Mesin presensi sidik jari | 1 |
| 13 | Lemari Besi | 2 |
| 14 | Lemari Kaca | 2 |
| 15 | Almari Besi Lereg Kaca | 6 |
| 16 | Rak Arsip | 3 |
| 17 | Filing Cabinet Besi | 11 |
| 18 | Filling Cabinet | 9 |
| 19 | Brandkas | 1 |
| 20 | Kotak Kartu Kendali | 3 |
| 21 | Lemari Sorok / Pustaka | 5 |
| 22 | Papan Informasi | 1 |
| 23 | Papan Pengumuman | 2 |
| 24 | Papan Tulis | 4 |
| 25 | Papan Absen | 1 |
| 26 | White Board | 3 |
| 27 | Whiteboard satu muka uk.90 x 180 | 1 |
| 28 | Whiteboard  | 2 |
| 29 | Peta Wilayah | 2 |
| 30 | Pemotong Kertas | 1 |
| 31 | Mesin Laminating | 1 |
| 32 | Lemari Kayu | 14 |
| 33 | Kursi Tunggu Kayu | 3 |
| 34 | Zice | 1 |
| 35 | Meja Kursi Tamu | 1 |
| 36 | Meja Rapat | 20 |
| 37 | Meja sidang/rapat double | 4 |
| 38 | Meja Sidang/Rapat Single | 1 |
| 39 | Meja Sidang/Rapat Sudut | 1 |
| 40 | Meja Tulis | 2 |
| 41 | Meja Tik | 1 |
| 42 | Kursi Susun | 1 |
| 43 | Kursi Sidang/Rapat Susun | 11 |
| 44 | Kursi rapat susun | 26 |
| 45 | Kursi Tamu | 9 |
| 46 | Kursi putar | 8 |
| 47 | Kursi kerja putar tanganan | 3 |
| 48 | Kursi putar komputer | 4 |
| 49 | Kursi putar sand rendah | 1 |
| 50 | Kursi Tunggu 4 Seat Besi | 4 |
| 51 | Kursi Lipat | 150 |
| 52 | Meja Komputer | 14 |
| 53 | Meja Kerja 1/2 Biro | 13 |
| 54 | Vitrage | 1 |
| 55 | Korden | 1 |
| 56 | Rail | 1 |
| 57 | karpet valensia | 1 |
| 58 | karpet ekstasi | 1 |
| 59 | Jam Dinding | 10 |
| 60 | AC Unit | 1 |
| 61 | AC 1,5 PK | 2 |
| 62 | AC | 1 |
| 63 | AC 2 PK | 1 |
| 64 | AC 1 PK | 1 |
| 65 | Kipas Angin | 7 |
| 66 | Kipas Angin Berdiri | 3 |
| 67 | Kipas Angin Dinding | 3 |
| 68 | Kipas Angin Gantung | 1 |
| 69 | Exhaous FAN | 3 |
| 70 | Air Purifier (CHT) | 1 |
| 71 | Radio FM | 1 |
| 72 | Televisi | 1 |
| 73 | TV LED 22 inchi | 1 |
| 74 | LED TV + Bracket | 1 |
| 75 | Amplifier | 1 |
| 76 | Loudspeaker | 1 |
| 77 | Speaker column | 1 |
| 78 | speaker aktif | 1 |
| 79 | Sound system | 1 |
| 80 | DVD player | 1 |
| 81 | Wireless | 1 |
| 82 | Wireless With Public Addres | 1 |
| 83 | Microphone | 2 |
| 84 | Stand mic | 1 |
| 85 | Tiang mic duduk | 1 |
| 86 | UPS | 3 |
| 87 | UPS 600 VA | 5 |
| 88 | Stabilizer | 3 |
| 89 | Lambang Garuda | 2 |
| 90 | Gambar Wakil Presiden | 3 |
| 91 | Gambar Presiden | 3 |
| 92 | Tangga Lipat/alumunium | 2 |
| 93 | Dispencer | 3 |
| 94 | Tempat Parkir Sepeda | 4 |
| 95 | Alat Pemadam Kebakaran | 50 |
| 96 | Pompa Air (Water Pump Portable) | 1 |
| 97 | PC Unit | 8 |
| 98 | Komputer PC | 13 |
| 99 | Notebook | 5 |
| 100 | Komputer Tablet | 1 |
| 101 | PC. KIOSK | 1 |
| 102 | Printer | 5 |
| 103 | Printer Laserjet | 2 |
| 104 | Printer Dot Matrix | 1 |
| 105 | Printer Multifuntion | 1 |
| 106 | PRINTER INKJET | 2 |
| 107 | PRINTER LASERJET | 1 |
| 108 | Printer Multifuntion | 3 |
| 109 | Scanner | 1 |
| 110 | LCD Projector | 1 |
| 111 | Kamera Digital | 2 |
| 112 | Kamera Foto digital Pocket | 1 |
| 113 | Kamera Foto digital SLR | 1 |
| 114 | Screen OHP | 2 |
| 115 | LCD Projector | 4 |
| 116 | Tiang mic berdiri | 1 |
| 117 | Layar Projector Tripod 96 | 1 |
| 118 | Clip on mic wireless | 1 |
| 119 | Handy Talky (HT) | 1 |
| 120 | Megaphone | 1 |
| 121 | PABX | 1 |
| 122 | Telephone | 1 |
| 123 | Pesawat Telepon | 9 |
| 124 | Pesawat IP Phone | 2 |
| 125 | IP Phones | 2 |
| 126 | I-Phone | 1 |
| 127 | Handy talky (HT) VHF | 8 |
| 128 | Facsilmile | 1 |
| 129 | Box MDF | 1 |
| 130 | Timbangan | 1 |

**Tabel 1.5.2**

**Barang Inventaris Perolehan Tahun 2013-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Spesifikasi Barang** | **Jumlah** |
| NO | Nama/Jenis Barang |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Minibus |  1 |
| 2 | Mesin Gergaji | 1 |
| 3 | Mesin Ketik | 1 |
| 4 | Alat Pemadam Kebakaran |  43 |
| 5 | Tempat Parkir sepeda | 4 |
| 6 | Pompa Air |  1 |
| 7 | Notebook |  1 |
| 8 | Kendaraan Bermotor Roda 3 | 1 |
| 9 | WhiteBoard | 1 |
| 10 | Kursi Kerja Putar Tanganan | 3 |
| 11 | Kursi Tunggu 4 seat besi | 2 |
| 12 | AC 1 PK | 1 |
| 13 | TV LED 22 inchi | 1 |
| 14 | Komputer PC | 4 |
| 15 | Printer Inkjet | 1 |
| 16 | Printer Laserjet | 1 |
| 17 | Kamera Foto Digital | 1 |
| 18 | PC KIOS.K | 1 |
| 19 | PABX 4 line 16 ext | 1 |
| 20 | pesawat Telepon Analog | 2 |
| 21 | Box MDF | 1 |
| 22 | IP PHONES | 2 |
| 23 | Rambu Portable | 1 |
| 24 | Handy Talky | 1 |
| 25 | Dispenser | 1 |
| 26 | Printer Multifunction | 1 |
| 27 | Printer Inkjet | 1 |
| 28 | PC Komputer | 2 |
| 29 | UPS | 1 |
| 30 | LCD Projector | 1 |
| 31 | Sepeda motor | 1 |
| 32 | Kursi putar komputer | 1 |
| 33 | Mesin presensi sidik jari | 1 |
| 34 | Kipas angin berdiri | 1 |
| 35 | Kipas angin gantung | 1 |
| 36 | Dispenser | 1 |
| 37 | Kamera foto digital pocket | 1 |
| 38 | kursi putar sandaran rendah | 1 |
| 39 | kursi lipat | 1 |
| 40 | Tangga lipat Aluminium | 1 |
| 41 | Layar projector | 1 |
| 42 | Clip on mic duduk | 1 |
| 43 | Tiang mic duduk | 1 |
| 44 | Tiang mic berdiri | 1 |
| 45 | Meja komputer | 1 |
| 46 | meja kursi tamu | 1 |
| 47 | Filling Cabinet | 2 |
| 48 | Led tv 32" + braket | 1 |
| 49 | Almari besi lereg kaca | 1 |
| 50 | kipas angin dinding | 1 |
| 51 | wireless with public addres | 1 |
| 52 | mesin ketik manual | 1 |
| 53 | notebook | 1 |
| 54 | handy talky (ht) vhf | 1 |
| 55 | printer multifuntion | 1 |
| 56 | Meteran Digital | 1 |
| 57 | Senter | 2 |
| 58 | Meja kerja1/2 biro | 1 |
| 59 | Meja Pelayanan | 1 |
| 60 | kursi tunggu 4 seat | 1 |
| 61 | kursi rapat lipat | 15 |
| 62 | Whiteboard | 1 |
| 63 | jam dinding | 1 |
| 64 | Rak koran | 1 |
| 65 | Almari besi 2 pintu | 1 |
| 66 | kursi tunggu 4 seat | 1 |
| 67 | Mesin genset 5 kva | 1 |

* 1. **Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ada tahun 2020 berasal dari APBD Perubahan Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2020 Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.440.286.582,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.845.143.000 ,- dan belanja langsung sebesar Rp 2.595.143.582 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD Perubahan sebesar Rp 2.595.143.582,- yang didukung oleh 4 program dan 12 kegiatan.

* 1. **Sistematika Laporan Kinerja Instansi**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Juga ditulis pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta . Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

**2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2020, Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Kraton Kota Yogyakartamerupakan manifestasi komitmen Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun.Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kraton Kota Yogyakart yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

**2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1

Ringksan Visi Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visi** | **Misi** | **Sasaran Daerah** |
| Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan | 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
 | 1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
 |
| 1. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
 |
| 1. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
 |
| 1. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
 | 1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
 |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
 |
| 1. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
 | 1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun
 |
| 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
 | 1. Kualitas pendidikan meningkat
 |
| 1. Harapan hidup masyarakat meningkat
 |
| 1. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
 |
|
| 1. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
 | 1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
 |
| 1. Kualitas lingkungan hidup meningkat
 |
| 1. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
 | 1. Infrastruktur wilayah meningkat
 |
| 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
 | 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
 |

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Kraton mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan.
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan menurun.
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Pola pangan harapan.
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian sasaran: Indeks ketimpangan pendapatan.
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Angka pertumbuhan ekonomi.
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator capaian sasaran: Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda.
7. Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah.
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Angka harapan hidup.
9. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Persentase rintisan desa budaya yang aktif.
10. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Indeks kualitas lingkungan hidup.
11. Infrastuktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Indeks infrastuktur wilayah
12. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah
	* 1. **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

**Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Kraton salama 5 tahun anggaran adalah “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 326.

**Sasaran Strategis**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kraton

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkanperkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilaievaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 351,67 |

* + 1. **Strategi, Program Dan Kegiatan**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya cita-cita pembangunan daerah. Sasaran dan Kebijakan ini yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD dalam setiap tahunnnya.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana halter sebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam kerangka perencanaan strategis di Kecamatan Kraton adalah dengan menetapkan program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

|  |
| --- |
| * + - 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
			2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 |

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD

1. ProgramPeningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
2. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kraton
3. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kraton
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Kadipaten
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Patehan
8. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton.

Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran,Program dan Kegiatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN |
| Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat |  |  |
|  | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 | 1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 |
|  | 1. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
 | * 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 |
|  | 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD |
|  | 1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
 | 1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kraton
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kraton
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Kadipaten
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Patehan
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Kraton
 |

* 1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja (Murni) Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 325 |

Pada tahun 2020, Kecamatan Kraton melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya monitoring dan evaluasi terhadaap kegiatan maupun output kegiataan sehingga harus dilaksanakan Perubahan Indikator Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kraton. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 341,67 |

* 1. **Rencana Anggaran Tahun 2020**

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Kraton melaksankan Penyempurnaan Anggaran 2 (dua) kali dan juga Perubahan Anggaran . Awal tahun 2020 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 7.961.840.700-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.064.773.000,- dan Belanja Langsung Rp 5.897.067.700,-, Selanjutanya pada Bulan Maret dikarenakan ada pergeseran dan penataan anggaran untuk Dana Kelurahan maka Kecamatan Kraton menata anggaran dengan mekanisme Penyempuranaan Anggan 1 dengan pagu anggaran masih sama dengan anggaran murni , kemudian dikarenakan terdampak wabah virus corona maka Kecamatan Kraton merasionalisasi anggaran untuk mendukung ketercukupan dana untuk penanggulangan virus corona covid-19, dengan mekanisme Penyempurnaan Anggaran 3 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 4.683.238.082 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.064.773.000 dan Belanja Langsung Rp. 2.618.465.082, selanjutnya pada Triwulan IV Kecamatan Kraton Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menata anggaran dengan menggeser rekening dan menghapus yang tidak tersealisasi sehingga pagu anggaran di Perubahan Anggaran menjadi Rp. 4.440.286.582,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.845.143.000,- dan Belanja Langsung Rp. 2.595.143.582,-.

* + 1. **Target Belanja Perangkat Daerah**

Tabel 2.6

Target Belanja Kecamatan Kraton

Pada APBD Perubahan Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Target |
| Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.845.143.000,- |
| Belanja Langsung | Rp. 2.595.143.582,- |
| Jumlah | Rp. 4.440.286.582,- |

* + 1. **Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Kecamatan Kraton yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran | Anggaran | Prosentase (%) |
| Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | 1.966.278.737,- | 100% |
| * 1. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kraton
 | 63.378.500,- | 100% |
| * 1. Pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan Kraton
 | 61.161.600,- | 100% |
| * 1. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 40.147.000,- | 100% |
| * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Patehan
 | 495.502.682,- | 100% |
| * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Panembahan
 | 741.998.715,- | 100% |
| * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kadipaten
 | 532.857.240,- | 100% |
| * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 31.233.000,- | 100% |

# AKUNTABILITAS KINERJA

* 1. **Capaian Kinerja Tahun 2020**

Pada sub bab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kraton

|  |  |
| --- | --- |
| Misi 1 | Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/sasaran | Target | Sumber data |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 351,67 | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan |

Data : Review Renstra 2017-2022

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1. | 91 ≥ 100 | Sangat Baik |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kecamatan Kraton telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kraton Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dari hasil penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis yang telah disepakati Tahun 2020 ini telah melampaui target dari 341,67 terealisir 350,67 atau 102,63 % sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Utama Kecamatan Kraton

|  |  |
| --- | --- |
| Misi 1 | Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/sasaran | Capaian Kinerja | Sumber data |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 251,33 | 362,33 | 353 | 350,67 | - | - | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan |

Data : Review Renstra 2017-2022

Keberhasilan pencapaian target yang sampai melebihi 100 % disebabkan oleh faktor pendukung antara lain :

* + 1. Kesadaran dan partisipasi warga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kraton
		2. Kepemimpinan Camat dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan kepada mitra kerja pemerintah dan warga mayarakat untuk mendukung dan menyukseskan program dan kegiatan di Kecamatan Kraton.
		3. Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Camat Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang

**3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kecamatan Kraton mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu

* + - * 1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 518 Tahun 2019 Tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019, maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kraton yang menjadi dasar pemberian bantuan di Tahun 2020

Tabel 3.4

Perbandingan Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 dan 2019

Untuk Data KMS 3 atau Rentan Miskin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kecamatan /Kelurahan | KMS 3 | Keterangan |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | selisih | % |
| Kecamatan Kraton | 3.534 | 3.250 | (284) | turun | (8,04) |
| Kelurahan Patehan | 1.143 | 1.001 | (142) | turun | (12,42) |
| Kelurahan Panembahan | 1.695 | 1.620 |  (75) | turun | (4,42) |
| Kelurahan Kadipaten |  696 |  629 |  (67) | turun | (9,63) |

Untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di musim pandemi Virus Corona di kelurahan se Kecamatan Kraton ,kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan yang langsung mengintervensi penduduk yang masuk dalam kriteria penduduk miskin (Sumber data dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Kantor BPS). Kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan bagi penduduk yang masuk kriteria miskin dan juga terdampak virus corona sebagai sarana recoveri ekonomi yang pada akhirnya dapat mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga menggunakan SIM Pemberdayaan yang mana memuat nama dan alamat penduduk miskin wajib ikut dalam pelatihan. Pelatihan yang ada seperti budidaya lele cendol di Kelurahan Kadipaten dan Pelatihan membuat kue tradisional di Kelurahan Panembahan.

Tabel dibawah menunjukkan jumlah keluarga miskin Tahun 2019 sebagai dasar pemberian bantuan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 518 Tahun 2019 Tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Tabel 3.5

Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 dan 2019

Untuk Data KMS 2 atau Miskin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kecamatan /Kelurahan | KMS 2 | Keterangan |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | selisih | % |
| Kecamatan Kraton | 637 | 875 | 238 | naik | 37,36 |
| Kelurahan Patehan | 99 | 168 | 69 | naik | 69,7 |
| Kelurahan Panembahan | 306 | 305 |  (1) | turun | (0,33) |
| Kelurahan Kadipaten | 0 |  402 |  402 | naik | - |

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2019 bahwa untuk penduduk KMS 3 Kecamatan Kraton mengalami penurunan di semua Kelurahan sedangkan untuk penduduk KMS 2 Kecamatan Kraton mengalami kenaikan, hanya Kelurahan Panembahan mengalami penurunan 1 orang. Data diatas yang harus menjadi perhatian dan kerja keras dari semua pihak adalah karena adanya kenaikan di KMS 2 di Tahun 2019 dari 637 jiwa menjadi 875 jiwa Tahun 2019. Upaya penurunan angka kemiskinan tidak saja menjadi tanggung jawab kecamatan dan kelurahan semata tetapi harus ada sinergitas dan tanggungjawab bersama 5 K,yaitu : Kota, Kampus, Korporasi, Komunitas dan Kampung. Jadi Tahun 2020 dari data sd akhir 2019 bisa ditarik kesimpulan angka kemiskinan di Kecamatan Kraton mengalami penurunan dari 1.328 KK (4.171 jiwa) menjadi 1.334 KK (4.125 jiwa).

1. Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan menurun.

Program dan kegiatan Kecamatan Kraton dan Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan dan Kelurahan Kadipaten dalam upaya intervensi penduduk yang masuk dalam KMS dan juga bagai warga masyarakat yang terdampak virus corona untuk bisa bangkit dan menstabilkan ekonomi dan juga dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat, dengan pelatihan ketrampilan yang mudah diterima dan dipahami mereka sebagai sarana recovery ekonomi.

1. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Pola pangan harapan

Pada Tahun 2020, kelurahan se Kecamatan Kraton menggunakan keseluruhan Dana Kelurahan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk recovery ekonomi dikarenakan terdampak virus corona. Kegiatan tersebut diantaranya, pelatihan lele cendol dan budidaya lorong sayur, yang bertujuan selain untuk meningkatkan gizi masyarakat juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga. Titik tolak pentingnya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah diharapkan masyarakat memiliki ketahanan pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung pada kondisi pasar.

1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Indeks ketimpangan pendapatan
2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka pertumbuhan ekonomi
3. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda

Kecamatan Kraton secara rutin mengadakan penertiban pondokan penataan PKL, penertiban reklame dan IMB. Dengan berjalannya semua kegiatan di seksi ketentaman dan ketertiban dan bantuan dari BKO diharapkan akan mampu menekan angka kriminalitas di Kecamatan Kraton. Kegiatan penertiban yang rutin dijalankan juga bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran Perda. Kegiatan tersebut juga dilaporkan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah.

1. Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan data dari TP UKS Kecamatan Kraton bahwa tidak ada anak putus sekolah di wilayah Kecamatan Kraton. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kecamatan Kraton relatif bagus.

1. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka harapan hidup
2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Persentase rintisan desa budaya yang aktif

Kecamatan Kraton mempunyai Rintisan Kampung Budaya yang berada di Kelurahan Patehan

1. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks kualitas lingkungan hidup
2. Infrastuktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks infrastuktur wilayah
3. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target dan relelisasi kinerja Tahun 2020 Kecamatan Kraton pada kinerja sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton |
| Sasaran | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat |
| Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
| Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 341,67 | 350,67 | 102,63% |

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian kinerja sasaran Kecamatan Kraton adalah 102,63% maka masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja dengan nilai peringkat sangat baik. Oleh karena itu kenaikan capaian realisasi kinerja dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kraton berkinerja dengan optimal karena kualitas capaian kinerja dan tingkat perkembangan kelurahan dalam kategori yang sama yaitu cepat berkembang. Hal ini berdasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahun 2020 Kecamatan Kraton melakukan review Renstra 2017-2022 untuk target indikator kinerja, dikarenakan capaian kinerja Tahun 2019 untuk indikator sasaran dan indikator program melampau dari target renstra yang sudah ditetapkan. Dan juga ada perubahan indikator program dari tingkat swadaya masyarakat menjadi swadaya murni dan juga ada indikator program baru yaitu jumlah pelanggaran perda, maka renstra perlu direview. Untuk indikator sasaran Tahun 2020 target awal renstra adalah 325, sedangkan capaian Tahun 2019 sebesar 353, sehingga perlu dilakukan Review terhadap target Renstra 2017-2022 pada indikator sasaran, target tidak disesuaikan dengan capaian 2019 dikarenakan masa pandemi virus corona sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh apada capaian evaluasi kelurahan Tahun 2020. .Dan untuk capaian kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020 Kecamatan Kraton untuk target sasaran adalah 341,67, dan pencapaian realisasi sasaran strategis adalah 350,67.

Demikian pula Review terhadap target Renstra dilakukan untuk Target Program Kecamatan Kraton yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan indikator program adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk capaian realisasi SKM Tahun 2019 adalah 80,37 melampau dari target Tahun 2020 yaitu 76,19. Maka perlu direview, dan hasil review tidak sebesar relaisasi Tahun 2019 dikarenakan masa pandemic virus corona dikhawatirkan akan terdampak pada indikator program tersebut, target direview menjadi 77,19 dan tercapai dengan realisasi sebesar 81,75

Kecamatan Kraton untuk Tahun 2020 pada indikator program pada Tingkat Swadaya Masyarakat direview menjadi Angka swadaya murni dengan formula indikator Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan. Dan target angka swadaya murni Tahun 2020 adalah Rp. 429.601.667.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Kraton mereview Renstra juga karena ada indikator Program baru yang mulai diterapkan dari Tahun 2021-2022, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda, dan Tahun 2021 target Jumlah Pelanggaran Perda adalah 240

Selanjutnya capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tahun 2020 |
| No | Program/kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | % |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 77,19% | 81,75% | 105,90% |
| Angka Swadaya Murni | 429.601.667 | 985.272.500 | 229,34% |

Rumus penghitungan nilai indikator program untuk program eksternal yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut:

1. Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah Jumlah NRR \* nilai tertimbang dari 9 unsur \* 25. (terlampir)
2. Angka Swadaya Murni menggunakan ketentuan jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan.

Data penunjang Angka Swadaya Murni Masyarakat sebagaimana yang dilaporkan dari kelurahan se Kecamatan Kraton dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Data Prosentase Angka Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | LPMK | Tahun 2020 |
| Target | Realisasi | % |
| 1. | Kelurahan Patehen | 90.380.000,- | 326.380.000,- | 361,12 |
| 2. | Kelurahan Panembahan | 137.437.500,- | 346.342.500,- | 252,00 |
| 3. | Kelurahan Kadipaten | 120.250.000,- | 312.550.000,- | 259,92 |
|  |  |  |  | 229,34 |

Berdasarkan capaian kinerja program pada Tabel 3.7 dan 3.8 prosentase kedua indikator program, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 adalah 114,97 % dengan nilai peringkat kinerja sangat baik.
2. Prosentase capaian kinerja tingkat indikator Angka Swadaya Murni Tahun 2020 melebihi yang ditargetkan 229,34% .

3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sasaran Tahun 2020 dengan

Tahun-tahun sebelumnya

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraon |
| Sasaran Strategis | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat |
|  | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| Indikator Kinerja Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian  | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton  | 306 | 362,33 | 118,40% | 320 | 353 | 110,31% | 341,67 | 350,67 | 102,63% |

Capaian kinerja untuk tahun 2018 tercapai 118,40% dari target , capaian Tahun 2019 tercapai 110,31% Dan Tahun 2020 tercapai 102.63% Hal ini dapat dilihat pada tingkat perkembangan kelurahan se Kecamatan Kraton berada pada tataran cepat berkembang baik pada Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

Tabel 3.10

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator | Formula Indikator |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan |

Kinerja sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2019 | 2020 | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%) |
| Target | Realisasi | % Realisasi\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | 353 | 341,67 | 350,67 | 102,63 | 351,67 | 99.71 |

Selanjutnya analisis untuk Indikator Program adalah formulasi perhitungan diambil dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Angka Swadaya Murni.

Untuk memperdalam data terkait perbandingan capaian dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/kegiatan | Indikator | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 76,19 | 80,37 | 105,50 % | 77,19 | 81,75 | 105,90% |
| Angka Swadaya Murni  | - | - | - | 429,601,667 | 985,272,500 | 229,34% |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Kraton yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan indikator program adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk capaian realisasi SKM Tahun 20120 adalah 81,75 melampau dari target 77,19.

Sedangkan untuk indikator program pada Angka Swadaya Murni juga telah melebihi target yang telah ditetapkan karena capaian realisasi 229,34 %

3.2.3 Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dengan tahun sebelumnya diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.13

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program | Indikator | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target dalam Renstra tahun ke-1 | Target Akhir Renstra | Prosentase capaian tahun ini terhadap target Renstra tahun ke-1 | Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra |
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 77,19 | 81,75 | 77,19 | 77,69 | 105.90% | 105.22% |
| Angka Swadaya Murni | 429.601.667 | 985.272.500 | 229.34% | 429.601.667 | 229.34% | 229.34% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran  | Target Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2020 | Target Renstra tahun 1 | Target Renstra tahun 2 | Target Akhir Renstra |
| Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 341,20 | 350,67 | 341,67 | 346,67 | 351,67 |

* 1. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya**

3.3.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kecamatan Kraton pada tahun 2020 ini mencapai capaian kinerja yang baik dalam mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung dengan data capaian kinerja sasaran maupun indikator kinerja program yang sudah diuraikan pada bab yang sama.

Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kraton untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Kraton yang diuraikan pada Bab 2 laporan ini.

Indikator kinerja sasaran berupa Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton pada Tahun 2020 ditargetkan 341,67 sedangkan capaian realisasi dengan formulasi penghitungannya adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan yang ada, maka diperoleh hasil 350,67 atau dengan capaian 102,63%, oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Kraton untuk Tahun 2020 dapat melampau hasil sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Internal
	1. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA OPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya. Biarpun beberapa kali DPA Kecamatan Kraton mengalami perubahan dari penyempurnaan anggaran sampai dengan perubahan anggaran dikarenakan dukungan pemenuhan kebutuhan pemerintah Kota Yogyakarta karena terdampak virus corona namun dengan anggaran yang ada Kecamatan Kraton mampu berjalan dengan baik.

* 1. Kerjasama internal yang baik dan solid

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Kraton dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

* 1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Dan Kecamatan Kraton sudah rutin melaksanakan rapat internal pada Hari Senin pagi, dimana menjadikan forum untuk monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan seminggu yang lalu dan rencana kegiatan seminggu kedepan

* 1. Dengan kemajuan teknologi informasi menunjang kinerja OPD untuk mempercepat kinerja dengan harapan program dan kegiatan dapat dengan cepat diakses dan dirasakan oleh masyarakat.
1. Faktor Eksternal
	1. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

* 1. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

* + 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Analisis Efisiensi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/kegiatan | Anggaran | Realisasi | Efisiensi |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 594.553.570,- | 583.081.730,- | 11.471.840,- |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 33.211.275,- | 31.256.427,- | 1.954.848,- |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.100.000,- | 1.100.000,- | - |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | 1.966.278.737,- | 1.943.049.939,- | 23.228.798,- |
|  | * 1. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
 | 63.378.500,- | 62.858.500,- | 520.000,- |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 61.161.000,- | 60.992.458,- | 169.142,- |
|  | * 1. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 40.147.000,- | 40.147.000,- | - |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan
 | 495.502.682,- | 479.081.249,- | 16.421.433,- |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
 | 741.998.715,- | 738.876.583,- | 3.122.132,- |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten
 | 532.857.240,- | 529.861.149,- | 2.996.091,- |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 31.233.000,- | 31.233.000,- | 0 |

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

* + - 1. Pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan riil. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan oleh karena kebutuhan tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain juga seperti itu.
			2. Sub-sub anggaran pendukung pencapaian output ada beberapa yang tidak direalisasikan atau sebagian direalisasikan hanya sesuai dengan kebutuhan seprti belanja BBM, dikarenakan masa pandemi sehingga banyak agenda rapat yang dilaksanakan secara virtual jd agenda keluar sangat terbatas. Namun demikian hal itu tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton.
			3. Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton pada Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton di kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan terdapat efisiensi karena pelaksanaan Gebyar PAUD dilaksanakan dengan efisiensi anggaran karena masa pandemic virus corona dan protocol kesehatan , jumlah undangan yang dibatasi dan belanja sewa-sewa tidak digunakan, seperti sewa meja kursi, sewa pakaian dll.
		1. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2020, Kecamatan Kraton memiliki satu program kerja yaitu program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton.

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 341,67 sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formulasi tercapai target 350,67. Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

* + - Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kraton sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat pada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten.
		- Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan Kraton yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton.
		- Adanya Keterbukaan Informasi Publik

Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kraton sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

* + - Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan

Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT RW kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Kraton pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga pertisipasi masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kecamatan Kraton.

1. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja

Melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a diatas, maka dapat disimpulkan tidak diperoleh gambaran adanya hambatan yang menghambat dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Kraton. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas dan komitmen bersama bagi para pelaksana internal (ASN) harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Dan Pada Tahun 2020 ini Kota Yogyakarta terdampak akan Pandemi Virus Corona sekalipun demikian semua Program dan Kegiatan tetap berjalan lancar meskipun dengan anggaran yang terbatas dan kegiatan kemasyarakatan harus sesuai protokol kesehatan.

* 1. **Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,59 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton sebesar 98,82 %, sedangkan realisasi untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 98,07 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 94,11 % dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Keuangan sebesar 100 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program dan kegiatan maka bisa dilihat penyerapan anggaran terbesar pada Program Peningkatan Pengembangan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai 100%, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan 98,82% di kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Masyrakat Kecamatan Kraton sebesar 100% dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton tercapai 100%.

Pada Tahun 2020, Kecamatan Kraton masih mengampu Dana Kelurahan dari DAU Tambahan dan pada pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk recovery perekonomian masyarakat yang terdampak virus corona. Capaian Kinerja fisik pelaksanaan Dana Kelurahan dimasing-masing kelurahan tercapai 100%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut :

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/kegiatan | Anggaran | Realisasi | Prosentase |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 594.553.570,- | 583.081.730,- | 98.07 % |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 33.211.275,- | 31,256,427,- | 94,11 % |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,966,278,737,- | 1,943,049,939,- | 98,82 % |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | 2.887.554.006,- | 2.718.271.073,59,- | 94,14 % |
|  | * 1. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
 | 63.378.500,- | 62.858.500,- | 99,18 % |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 61.161.000,- | 60.992.458,- | 99,72 % |
|  | * 1. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 40.147.000,- | 40.147.000,- | 100% |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan
 | 495.502.682,- | 479.081.249,- | 96,69 % |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
 | 741.998.715,- | 738.876.583,- | 99,58 % |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten
 | 532.857.240,- | 529.861.149,- | 99,44 % |
|  | * 1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
 | 31.233.000,- | 31.233.000,- | 100 %- |

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk belanja langsung 98,59 % dan untuk belanja tidak langsung 95,30 % jika diambil nilai rata-rata menjadi 96,94%.(Laporan Fisik Keuangan terlampir)

**3.5 Inovasi**

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tahun 2020 Kecamatan Kraton telah menginisiasi inovasi-inovasi dalam rangka untuk menunjang pencapaian kinerja yang optimal, antara lain:

1. Replikasi inovasi cetak dokumen kependudukan mandiri di Kecamatan. (Dilaksanakan 14 Kecamatan).
2. Memotivasi warga dalam penanggulangan covid-19 seperti “Panembahan Semanak” (Panembahan Semangat, Sehat, Manunggal. Agamis dan Kreatif) yang rutin penyemprotan desinfektan rutin hari minggu dengan dana swadaya
3. Kecepatan Informasi dalam penyampaian berita ke Tokoh dan warga masyarakat Kelurahan Kadipaten , “Dewa Imut” (Dengan WA informasi mudah tersampaikan).

# P E N U T U P

# KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada tahun 2020 Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukan pencapaian target yang sangat baik. Dengan kata lain Kecamatan Kraton berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergisitas antara masyarakat, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota.

# RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan memperhatikan uraian data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa simpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi OPD Kecamatan Kraton pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja OPD kecamatan Kraton dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelapopran
2. Pengoptimalan perencanaan kegiatan pada awal penyusunannya
3. Pelaksanaan Evaluasi Program Kegiatan yang dilaksanakan setiap Senin pagi akan terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk evaluasi dari pelaksanaan program kegiatan dan rencana seminggu kedepan.
4. Melaksanakan monitoring di tingkat kelurahan maupun tingkat-tingkat di atasnya secara optimal dan upaya pemecahan permasalahan yang dapat menghambat kinerja OPD
5. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sumberdaya manusia yang tersedia di segala bidang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Kraton Tahun 2020 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta 30 Desember 2020

CAMAT KRATON

**Drs. S. WIDODO MUJIYATNA**

##  NIP. 19630916 198602 1 006